

SKRIPSI

ANALISIS *TAX BUOYANCY* DI INDONESIA

ANDI MUHAMMAD FAUZAN



**DEPARTEMEN ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2021

SKRIPSI

ANALISIS *TAX BUOYANCY* DI INDONESIA

ANDI MUHAMMAD FAUZAN



**DEPARTEMEN ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2021

SKRIPSI

ANALISIS *TAX BUOYANCY* DI INDONESIA

sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh
gelar Sarjana Ekonomi

disusun dan diajukan oleh

ANDI MUHAMMAD FAUZAN

A11116527



Kepada

**DEPARTEMEN ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2021**

SKRIPSI

ANALISIS TAX BUOYANCY DI INDONESIA

disusun dan diajukan oleh

ANDI MUHAMMAD FAUZAN
A11116527

telah diperiksa dan disetujui untuk diuji

Makassar, FEBRUARI 2021

Pembimbing I

ACC Ujian Skripsi
11/02/2021



Prof. Dr. H. Abd. Hamid Paddu, SE., MA.
NIP 19590306 198503 1 002

Pembimbing II



Dr. Amanus Khalifah Fil'ardy Yunus, SE., M.Si.
NIP 19880113 201504 1 001

Ketua Departemen Ilmu Ekonomi



Fakultas Ekonomi & Bisnis
Universitas Hasanuddin



Dr. Sanusi Fattah, SE., M.Si., CSF., CWM®.
NIP 19690413 199403 1 003

SKRIPSI

ANALISIS *TAX BUOYANCY* DI INDONESIA

disusun dan diajukan oleh

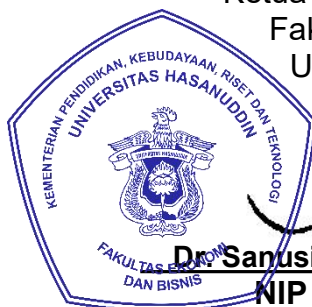
ANDI MUHAMMAD FAUZAN
A11116527


Telah dipertahankan dalam sidang ujian skripsi
Pada tanggal **8 JUNI 2021**
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,
Panitia Penguji

No.	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Prof. Dr. H. Abd. Hamid Paddu, SE., MA.	Ketua	1. 
2.	Dr. Amanus Khalifah Fil'ardy Yunus, SE., M.Si.	Sekretaris	2. 
3.	Drs. Muhammad Yusri Zamhuri, M.A., Ph.D.	Anggota	3. 
4.	Dr. Sanusi Fattah, SE., M.Si., CSF., CWM®.	Anggota	4. 

Ketua Departemen Ilmu Ekonomi
Fakultas Ekonomi & Bisnis
Universitas Hasanuddin




Dr. Sanusi Fattah, SE., M.Si., CSF., CWM®.
NIP 19690413 199403 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Andi Muhammad Fauzan
NIM : A11116517
Jurusan/Program Studi : Ilmu Ekonomi

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul:

ANALISIS TAX BUOYANCY DI INDONESIA

Adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Makassar, 08 Juni 2020

Yang membuat pernyataan,



Andi Muhammad Fauzan

PRAKATA



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Segala puji bagi Allah *Azza Wajalla*, atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, baik itu nikmat kesehatan, kesempatan dan waktu luang sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis ini dengan baik. Serta sholawat dan salam kami sampaikan kepada manusia terbaik Muhammad *Shallallahu 'alaihi wa sallam*, yang telah membawa risalah islam ini sebagai pegangan dan petunjuk dalam segala dimensi kehidupan.

Skripsi dengan judul *Analisis Tax Bouyancy* di Indonesia. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan jenjang S1 pada jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Hasanuddin Makassar.

Dengan segala kerendahan hati, penulis menyadari bahwa dalam karya tulis ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan adanya masukan dan kritik yang membangun, agar nantinya bisa dihasilkan sebuah karya tulis ilmiah yang lebih baik. Penulis juga menyadari dalam menyelesaikan karya tulis ini tidak terlepas dari kesungguhan hati dan kerja keras serta dorongan dan bantuan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga membuat penulis tetap bersemangat. Terkhusus untuk kedua orangtuaku, dengan segala hormat kusampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada **Andi Lukmanulhakim Jaya** dan **Andi Sitti Syamsidar** atas segala do'a yang dilantirkan setiap siang dan malam dan pengorbanan, kasih sayang yang tulus dalam membersamai setiap proses perkembangan penulis yang telah berhasil menjadi inspirator terbaik bagi penulis untuk tetap melanjutkan studi di jenjang S1, semua hal ini tidak akan mampu untuk penulis balaskan melainkan hanya berbakti kepada mereka. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada saudara dan saudari penulis yang telah berhasil menjadi contoh yang baik dalam banyak hal dan tentunya dalam mengikuti langkah-langkah mereka untuk semangat menjalani dan menyelesaikan pendidikan di jenjang S1.

Ucapan terima kasih juga diberikan kepada berbagai pihak atas bantuan dan dukungannya, yakni kepada :

1. Ibu Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, M.A. selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta jajarannya.
2. Bapak Prof. Dr. Abd. Rahman Kadir, S.E., M.Si., CIPM. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin beserta jajarannya.
3. Ketua Departemen Ilmu Ekonomi Bapak Dr. Sanusi Fattah, SE., M.Si., CSF., CWM[®]., dan Ibu Dr. Dwiana Sari Saudi, S.E., M.Si, selaku sekretaris Departemen Ilmu Ekonomi, Ibu Dr. Munawwarah S.Mubarak, SE., M.Si selaku penasehat Akademik penulis yang telah berjasa sepanjang masa studi penulis, serta seluruh dosen fakultas Ekonomi dan Bisnis, Terima Kasih atas segala bantuan yang senantiasa diberikan hingga penulis dapat menyelesaikan studi di Departemen Ilmu Ekonomi.
4. Bapak Prof. Dr. H. Abd. Hamid Paddu, SE., MA. Selaku Pembimbing I dan Bapak Dr. Amanus Khalifah Fil'ardy Yunus, SE., M.Si. Selaku Pembimbing II dalam penyusunan skripsi ini, terima kasih atas kesediaan dan keikhlasan telah meluangkan waktunya dari pagi hingga larut malam dalam memberikan ilmu, arahan, pemikiran,serta nasehat, yang telah menjadi inspirasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, semoga menjadi amal jariyah Aamiin.
5. Bapak Drs. Muhammad Yusri Zamhuri, M.A., Ph.D dan Dr. Sanusi Fattah, SE., M.Si., CSF., CWM[®]., selaku dosen penguji yang memberikan banyak ilmu dan motivasi bagi penulis untuk tidak berhenti belajar agar menjadi lebih baik dari waktu ke waktu.
6. Segenap pegawai akademik dari tingkat departemen pak aspar sapaan akrab beliau, yang tidak bosan-bosannya membantu penulis dalam memenuhi kewajiban kelengkapan administrasi pada proses perkuliahan hingga sidang ujian skripsi. Ucapan yang sama juga penulis sampaikan kepada pegawai di tingkat Fakultas Ekonomi dan Bisnis.
7. Kepada saudara seperjuangan teman-teman di kepengurusan HIMAJIE yang telah memberi warna kehidupan bagi penulis, nilai kebersamaan dan tanggung jawab serta ilmu dihimpun dari berbagai pemikiran membuat

penulis menjadi lebih semangat untuk menjadi pribadi yang lebih baik, terima kasih dan semoga kita mampu menjadi insan yang menebar kebermanfaatan di tengah masyarakat. Kepada teman-teman FoSEI terima kasih telah kebersamai penulis untuk tetap istiqomah menjadi pribadi yang peduli akan diri sendiri dan orang lain, semangat teman-teman akan cita-cita membumikan Ekonomi Rabbani semoga tak terhenti di dunia kampus.

8. Seluruh Teman-teman angkatan 2016 “SPHERE”. terima kasih telah kebersamai proses studi penulis hingga selesai. Semoga makin kompak di “Geng” masing-masing hehe. Tetap berinteraksi hingga maut menjemput!.
9. Teman-teman penulis yang banyak membantu dengan ikhlas dan tentu dengan otaknya yang cerdas serta karakter yang khas, Ismail Kadir, Yasmin, Iqbal, terima kasih atas jasa kalian yang gratis. Semoga menjadi amal jariyah, Aamiin.
10. Teman-teman KKN Gelombang 102 Kab. Sinjai, terkhusus di kelurahan Lappa. Terima kasih atas kebersamaan dan kesabarannya dalam kebersamai penulis berupaya menjalankan amanah untuk mengabdikan di tengah masyarakat.
11. Kepada Senior tercinta Angkatan 2013 Nurul Fatmawati, SE. Yang menjadi angan-angan penulis sejak masa MABA. Sosoknya mengajarkan untuk menggantungkan harapan pada yang Maha Kuasa. Dan beliau membuat penulis yakin akan dikabulkannya Do’a, ketika penulis memining beliau dan diterimanya bukan atas apa yang ada pada pribadi penulis, melainkan sebab Takdir yang Maha Kuasa yang mengabulkan Do’a penulis selama kurang lebih 4 tahun lamanya, memendam cinta dalam diam yang senantiasa di langitkan. Syukur Alhamdulillah dan Terima kasih tiada henti penulis ucapkan kepada Istri tercinta telah sabar kebersamai penyusunan Skripsi dari awal hingga masa akhir pendaftaran Wisuda periode 2021. lembar kertas tak akan cukup menjadi media atas curhatan isi hati penulis untuk mengungkapkan bagaimana sosok istri sholehah idaman penulis telah kebersamai. Semoga Allah membalas segala kebaikanmu di dunia dan di akhirat hingga kita tetap bisa bersama di SurgaNya kelak. Bersama buah

hati tercinta Andi Muhammad Hasan dan adiknya-adiknya Coming Soon jika diberi Rezeki olehNya. Aamiin.

Akhir kata, Alhamdulillah atas segala nikmat yang telah tergapai semasa hidup, Semoga Allah Azza Wa Jalla memberikan balasan yang terbaik atas segala amal-amal kita di dunia yang di Ridhoi dan di berkahiNya atas segala RahmatNya yang tak terbatas, semoga Kita bersua di SurgaNya kelak, sebaik-baik tempat, sebaik-baik balasan dariNya yang telah di janjikan kepada Hamba-hambaNya. Aamiin Ya Rabbal 'Alamiin.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Makassar, 8 Juni 2021

Andi Muhammad Fauzan

ABSTRAK

Analisis *Tax Bouyancy* Di Indonesia

Andi Muhammad Fauzan

H. Abd. Hamid Paddu

Amanus Khalifa Fil'ardy Yunus

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh konsumsi, investasi, dan *trade openness* terhadap perkembangan penerimaan pajak dan pertumbuhan ekonomi/*Tax buoyancy* di Indonesia. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS), Bank Indonesia (BI), dan *World Bank*. Adapun data yang digunakan yaitu data *time series* periode tahun 2001-2019, analisis data menggunakan metode *ordinary least square* (OLS). Hasil penelitian menunjukkan seluruh variabel independen berpengaruh signifikan terhadap *tax buoyancy*. Adapun variabel konsumsi berpengaruh signifikan dan negatif pada *tax buoyancy*, hal ini menggambarkan peningkatan konsumsi memiliki pengaruh pada nilai pertumbuhan ekonomi nasional namun tidak memberikan sumbangsi terhadap nilai pertumbuhan penerimaan pajak nasional, hal tersebut terjadi disebabkan kewenangan pemerintah daerah untuk mengumpulkan pajak konsumsi, serta dominasi sektor non formal belum diberlakukan administrasi pajak. Kemudian hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa investasi dan *trade openness* berpengaruh signifikan dan positif terhadap *tax buoyancy*, dimana investasi dan *trade openness* merupakan basis penerimaan pajak.

Kata Kunci: *Tax Bouyancy, Konsumsi, Investasi, Trade Openness*.

ABSTRACT

Tax Bouyancy Analysis In Indonesian

Andi Muhammad Fauzan

H. Abd. Hamid Paddu

Amanus Khalifa Fil'ardy Yunus

This study aims to analyze the effect of consumption, investment, and trade openness on the development of tax revenue and economic growth/Tax buoyancy in Indonesia. This study uses secondary data obtained from the Central Statistics Agency (BPS), Bank Indonesia (BI), and the World Bank. The data used is time series data for the period 2001-2019, data analysis using the ordinary least square (OLS) method. The results show that all independent variables have a significant effect on tax buoyancy. The consumption variable has a significant and negative effect on the tax buoyancy, this illustrates that increased consumption has an influence on the value of national economic growth but does not contribute to the growth value of national tax revenues, this occurs due to the authority of local governments to collect consumption taxes, as well as the dominance of the non-profit sector. No formal tax administration has yet been implemented. Then the results of this research also show that investment and trade openness have a significant and positive effect on tax buoyancy, where investment and trade openness constitute basis of tax revenue.

Keywords: Tax Bouyancy, Consumption, Investment, Trade Opennes, Economic Growth

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iv
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	v
PRAKATA.....	vi
ABSTRAK.....	x
ABSTRACT.....	xi
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xv
DAFTAR TABEL.....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	14
1.3 Tujuan Penelitian.....	14
1.4 Manfaat Penelitian.....	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	16
2.1 Landasan Teori.....	16
2.1.1 <i>Tax Bouyancy</i>	16
2.1.2 Teori Pajak.....	17
2.1.3 Teori Pertumbuhan Ekonomi.....	20
2.1.3.1 Teori Pertumbuhan Ekonomi Klasik.....	21

2.1.3.2	Teori Pertumbuhan Ekonomi Neo Klasik.....	22
2.1.3.3	Teori Pertumbuhan Ekonomi Modern.....	23
2.1.4	Teori Konsumsi.....	24
2.1.5	Teori Investasi.....	26
2.1.5.1	Jenis-Jenis Investasi.....	28
2.1.5.2	Efek Investasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi.....	30
2.1.6	Teori Perdagangan Internasional.....	34
2.2	Hubungan Antar Variabel.....	35
2.2.1	Pengaruh Konsumsi Terhadap <i>Tax Buoyancy</i>	36
2.2.2	Pengaruh Investasi Terhadap <i>Tax Buoyancy</i>	37
2.2.3	Pengaruh <i>Trade Openness</i> Terhadap <i>Tax Buoyancy</i>	37
2.3	Penelitian Terdahulu.....	38
2.4	Kerangka Konseptual.....	42
2.5	Hipotesis.....	43
BAB III METODE PENELITIAN.....		44
3.1	Lokasi Penelitian.....	44
3.2	Jenis dan Sumber Data.....	44
3.3	Metode Analisis Data.....	44
3.4	Definisi Operasional Variabel.....	46
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....		48
4.1	Perkembangan Variabel Penelitian.....	48
4.1.1	Perkembangan <i>Tax Buoyancy</i> Indonesia Periode 2001 – 2019..	4848
4.1.2	Perkembangan Konsumsi Indonesia Periode 2001 – 2019.....	50
4.1.3	Perkembangan Investasi Indonesia Periode 2001 Sampai 2019.....	52
4.1.4	Perkembangan <i>Trade Openness</i> Indonesia Periode 2001 – 2019..	56
4.2	Hasil Estimasi Variabel – Variabel Penelitian.....	57
4.2.1	Hasil Estimasi Fungsi <i>Tax buoyancy</i>	57

4.2.2 Hasil Estimasi Pengaruh Konsumsi Terhadap <i>Tax Buoyancy</i>	58
4.2.3 Hasil Estimasi Pengaruh Investasi Terhadap <i>Tax Buoyancy</i>	59
4.2.4 Hasil Estimasi Pengaruh <i>Trade openness</i> Terhadap <i>Tax Buoyancy</i>	61
BAB V PENUTUP.....	63
5.1 Kesimpulan.....	63
5.2 Saran.....	65
DAFTAR PUSTAKA.....	67
LAMPIRAN.....	71

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 <i>Tax Buoyancy</i> di Indonesia Tahun 2013 sampai 2017.....	5
Gambar 1.2 Presentase Pertumbuhan penerimaan Pajak dan Konsumsi di Indonesia Tahun 2013 Sampai 2017.....	7
Gambar 1.3 Presentase Pertumbuhan Penerimaan Pajak dan Investasi di Indonesia Tahun 2013 Sampai 2017.....	11
Gambar 1.4 Presentase Pertumbuhan Penerimaan Pajak dan <i>Trade Openness</i> di Indonesia tahun 2013 Sampai 2017.....	13
Gambar 2.1 Kerangka Konseptual.....	43
Gambar 4.1 <i>Tax Buoyancy</i> di Indonesia Tahun 2001-2019.....	49
Gambar 4.2 Konsumsi Rumah Tangga di Indonesia Tahun 2001-2019.....	51
Gambar 4.3 Realisasi Investasi di Indonesia Tahun 2001-2019.....	53
Gambar 4.4 <i>Trade Openness</i> di Indonesia Tahun 2001-2019.....	56

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 4.1 Hasil Estimasi Fungsi <i>Tax Buoyancy</i>	57
--	----

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1 Data yang Digunakan Dalam Penelitian	72
Lampiran 2 Analisis Data Menggunakan Aplikasi SPSS 23.....	74
Lampiran 3 Biodata.....	77

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagai salah satu negara yang berkembang, Indonesia pasti sedang gencar gencarnya melaksanakan pembangunan nasional guna mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Di dalam pelaksanaannya pasti membutuhkan banyak biaya. Biaya tersebut diperoleh dari penerimaan negara, yang bersumber baik dari penerimaan sektor migas maupun nonmigas. Saat ini yang mendominasi penerimaan dalam negeri adalah sektor nonmigas karena migas memiliki harga yang berfluktuasi di pasar internasional sehingga dapat mengakibatkan ketidakstabilan dalam penerimaan negara.

Salah satu sumber utama penerimaan negara dari sektor nonmigas adalah penerimaan Pajak. Pajak merupakan sumber penerimaan strategis yang dapat digunakan untuk mengarahkan kehidupan masyarakat menuju kesejahteraan sesuai dengan tujuan pembangunan nasional. Oleh karena itu, pajak harus dikelola dengan baik agar keuangan negara dapat berjalan dengan lancar dan baik. Sebab sektor Pajak merupakan penerimaan negara yang sangat penting dalam upaya distribusi kesejahteraan, maka perlu diadakan peningkatan pada sektor tersebut.

Perkembangan Pajak di Indonesia semakin meningkat dari masa ke masa. Pajak ditempatkan pada posisi teratas sebagai sumber penerimaan yang pertama dan utama dalam meningkatkan kas negara. Untuk itu perlu adanya peningkatan kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam mewujudkan terciptanya

masyarakat yang taat pajak. Hal tersebut dapat dilihat dari semakin tingginya target penerimaan negara yang diharapkan dari sektor pajak. Target Pendapatan Negara dalam APBN tahun 2018 ditetapkan sebesar Rp 1.498,871 triliun, atau tumbuh sekitar 13-15%, dari perkiraan realisasi penerimaan pajak tahun 2017. Target Penerimaan perpajakan itu bersumber dari PPh Migas Rp35,934 triliun, PPh Nonmigas Rp751,77 triliun, PPN dan PPnBM Rp 493,888 triliun, PBB Rp17,295 triliun, Cukai Rp157,158 triliun, Pajak Lainnya Rp8,749 triliun, dan pajak Perdagangan Internasional Rp 34,075 triliun. Menurut Sri Mulyani (2016), ada beberapa Langkah untuk mencapai target perpajakan didasarkan atas beberapa kebijakan, yaitu dengan cara implementasi kebijakan amnesti pajak, ekstensifikasi dan penguatan basis data perpajakan, intensifikasi melalui penggunaan teknologi informasi, dan implementasi konfirmasi status wajib pajak bagi pelayanan publik. Langkah terakhir ialah mengarahkan perpajakan internasional untuk mendukung transparansi dan pertukaran informasi, pertumbuhan investasi, peningkatan perdagangan, dan perlindungan industri dalam negeri.

Pada tahun 2018 beberapa sektor pajak mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan. Hal ini dapat dilihat dari kenaikan target pertumbuhan penerimaan pajak dalam APBN 2018 yang naik 10,94% dari target APBN-P 2017. Berkat kenaikan ini, pemerintah juga tidak merubah target penerimaan pajak ditengah tahun. Hal ini menunjukkan pengelolaan APBN yang lebih baik dan kredibel.

Pertumbuhan penerimaan pajak sangat dipengaruhi oleh kinerja perekonomian. Hal ini tercermin dari kinerja penerimaan pajak secara sektoral yang setiap bulan dipublikasi oleh pemerintah. Penerimaan secara sektoral, mencerminkan pertumbuhan penerimaan pada setiap sektor. Berdasarkan data

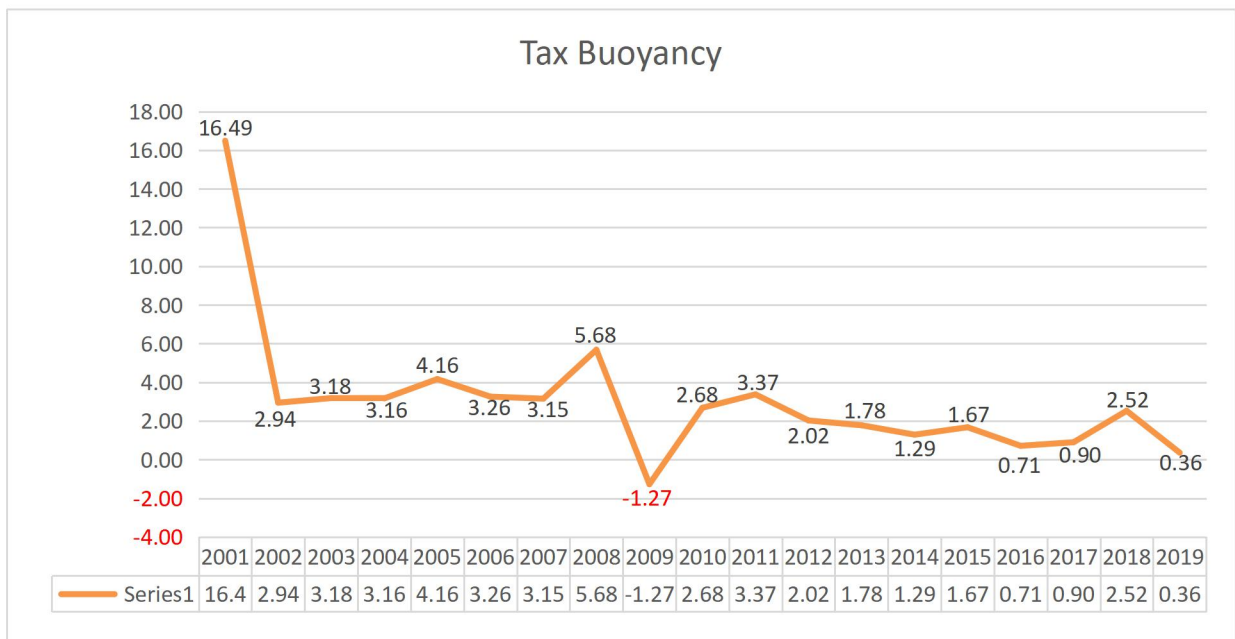
Kementerian Keuangan menunjukkan hampir semua sektor penerimaan pajak mengalami penurunan. Penerimaan pajak dari manufaktur menurun pada angka minus 3,2% sejalan dengan pertumbuhan sektor industri pengolahan yang selama tahun 2019 hanya tumbuh 4,15% year-on-year. Kinerja pertumbuhan sektor manufaktur atau industri pengolahan ini mengalami penurunan dibandingkan dengan 2018 yang waktu itu mampu tumbuh pada angka 4,33%.

Di satu sisi, penerimaan pada sektor perdagangan juga menunjukkan tren yang menurun pula. Pada September 2018 penerimaan pajak sektor ini mampu tumbuh di atas 25%, tetapi pada tahun 2019 hanya mampu tumbuh pada angka 2,8%. Penurunan kinerja penerimaan pajak dari sektor perdagangan ini sejalan dengan pertumbuhan sektor tersebut selama tahun 2019 yang hanya tumbuh 4,75% atau anjlok dibandingkan dengan tahun lalu yang mampu tembus pada angka 5,26% year-on-year.

Selain dua sektor di atas yang mengalami penurunan yang sangat signifikan. Korelasi antara penerimaan pajak dan pertumbuhan sektoral di dalam struktur produk domestik bruto (PDB) juga bisa dilihat sektor yang mengalami pertumbuhan positif. Sektor transportasi dan pergudangan misalnya, dari sisi pajak sektor ini mampu tumbuh pada angka 18,9%. Tren positif penerimaan pajak sektor tersebut merupakan implikasi pertumbuhan dari sektor ini yang sepanjang tahun 2019 mampu tumbuh pada angka 6,63% atau melebihi kuartal yang sama tahun lalu yakni pada angka 5,64%.

Selain itu, Pajak juga merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan teori, Pajak masuk kedalam faktor-faktor produksi khususnya akumulasi modal. Apabila penerimaan pajak meningkat maka akan meningkatkan output berupa barang dan jasa yang dihasilkan (PDB) karena pajak digunakan sebagai modal untuk kegiatan produksi yang

akan menghasilkan output berupa barang maupun jasa. Salah satu ukuran untuk melihat hubungan antara pajak dan pertumbuhan ekonomi adalah *tax buoyancy*. Tingkat kepekaan atau responsivitas penerimaan pajak terhadap pendapatan nasional atau pertumbuhan ekonomi suatu negara adalah variabel penting dalam memproyeksikan penerimaan pajak, dan merupakan kriteria dasar untuk pajak yang baik. Responsivitas ini diukur dengan dua konsep, elastisitas pajak yang mengukur respon otomatis penerimaan pajak terhadap perubahan basis pajaknya dan *tax buoyancy* yang mengukur respon penerimaan pajak terhadap perubahan pendapatan nasional, dalam hal ini Produk Domestik Bruto (PDB). Dua konsep ini juga berguna untuk mengevaluasi dampak perubahan kebijakan perpajakan yaitu: terhadap penerimaan pajaknya. Untuk menilai apakah kebijakan pajak tersebut efektif, perlu dipisahkan terlebih dahulu antara *tax elasticity* dan *tax buoyancy*. *tax buoyancy* mengacu pada respon dari perubahan *tax revenue* terhadap perubahan *GDP/PDB*, sedangkan *tax elasticity* mengacu pada perubahan pendapatan pajak sebagai tanggapan atas perubahan *tax rate*, secara sederhana *tax elasticity* menggambarkan respon penerimaan pajak terhadap perubahan *tax rate*/pajak itu sendiri, sedangkan *tax buoyancy* merupakan respon penerimaan pajak terhadap perubahan PDB .



Gambar 1.1

***Tax buoyancy* di Indonesia Tahun 2001 sampai 2019**

Sumber: Laporan Tahunan Bank Indonesia & World Bank 2001-2019 (Data diolah)

Berdasarkan gambar 1.1 menunjukkan bahwa elastisitas penerimaan pajak terhadap laju produk domestik bruto atau *tax buoyancy* pada tahun 2001 sampai 2019 berada pada posisi yang fluktuatif. Pada tahun 2001 nilai *tax buoyancy* Indonesia berada pada level 16.49% menunjukkan peningkatan penerimaan pajak terbesar selama 19 tahun terakhir, selanjutnya dari tahun 2002 hingga tahun 2008 menunjukkan tren peningkatan hingga pada level tertinggi selama 11 tahun terakhir yaitu 5.68%. Sedangkan nilai *tax buoyancy* pada tahun 2009 amblas hingga pada level -1.27%. Hal ini berarti pertumbuhan PDB 1% menyebabkan penurunan penerimaan pajak hingga -1.27%. Penurunan nilai *tax buoyancy* pada tahun 2009 antara lain disebabkan oleh krisis keuangan yang terjadi di USA (*Subprime Mortgage*) pada saat itu, yang menyebabkan kegoncangan perekonomian global, tak terkecuali Indonesia. Dengan adanya

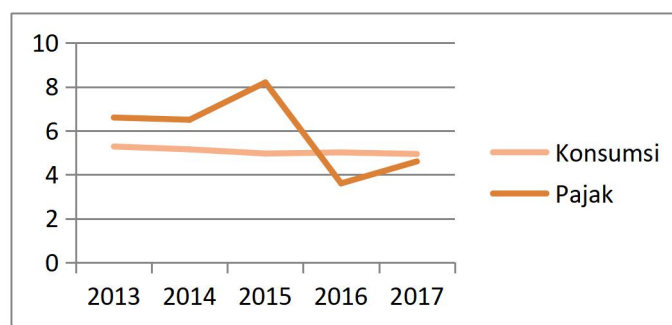
krisis ini, menyebabkan banyak investor asing menarik investornya di Indonesia (*capital outflow*) yang menyebabkan kondisi perusahaan terganggu sehingga kegiatan produksi ikut terganggu. Lebih lanjut lagi, berdasarkan data Kemenkeu yang diolah, *tax buoyancy* untuk pajak saja mencapai 0,36% pada 2019. Rendahnya *tax buoyancy* ini, menunjukkan masih adanya potensi penerimaan perpajakan dari kegiatan ekonomi yang tidak dapat ditangkap secara optimal. Performa ini juga dinilai sangat berkaitan erat dengan tingginya *shadow economy* dan rendahnya kepatuhan pembayar pajak. Besaran *shadow economy* di negara berkembang seperti Indonesia bisa mencapai 30% hingga 40% terhadap produk domestik bruto (PDB). *Shadow economy*, dalam sudut pandang perpajakan, disebut *hard to tax sectors*. Ini terjadi baik lewat usaha legal dari sektor informal, maupun usaha ilegal yang sengaja dijalankan untuk menghindari kewajiban administratif dan perpajakan. Untuk itu, diperlukan upaya penggalian potensi pajak untuk mendapatkan penambahan WP baru dari besarnya *shadow economy*.

Sektor konsumsi rumah tangga juga ikut berpengaruh bagi penerimaan pajak di Indonesia, dalam hal ini pajak pertambahan nilai (PPN). Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pungutan yang dibebankan atas transaksi jual-beli barang dan jasa yang dilakukan oleh wajib pajak Orang Pribadi atau wajib pajak Badan yang telah menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP). Yang berkewajiban memungut, menyetor, dan melaporkan PPN adalah para pedagang/penjual. Namun, pihak yang berkewajiban membayar PPN adalah konsumen akhir. Perlu diketahui bahwa pada dasarnya seluruh barang dan jasa dikenakan PPN kecuali barang dan jasa yang dikecualikan oleh Undang-Undang (UU) terkait. Beberapa jenis barang dan jasa yang dikecualikan dari pengenaan PPN seperti barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak,

uang, emas batangan, surat berharga, jasa pelayanan kesehatan medis, jasa pelayanan sosial, dan lainnya sebagaimana ditentukan oleh UU terkait.

PPN merupakan jenis pajak objektif yang artinya jenis pajak ini tidak memandang status wajib pajak melainkan hanya melihat objek ataupun barang yang berkaitan dengan transaksi antara penjual dan pembeli. Jenis pajak ini juga merupakan jenis pajak yang paling sering kita temukan dalam kehidupan sehari-hari karena menyangkut konsumsi barang dan jasa, misalnya ketika berbelanja kebutuhan sehari-hari di supermarket, membeli baju di toko, bahkan menggunakan listrik di rumah, secara tidak sadar sebenarnya kita sudah dikenakan PPN atas barang dan jasa yang kita beli tadi.

Secara umum, penerimaan PPN dapat dibandingkan dengan daya beli masyarakat dikarenakan PPN merupakan pajak atas konsumsi barang dan jasa. Peningkatan atau penurunan daya beli masyarakat seharusnya dapat menggambarkan pertumbuhan penerimaan PPN. Jika daya beli masyarakat meningkat maka sewajarnya penerimaan PPN naik begitu juga sebaliknya, jika daya beli masyarakat menurun maka penerimaan PPN akan ikut menurun. Faktor harga komoditas tentu sangat mempengaruhi daya beli masyarakat.



Grafik 1.2
Presentase Pertumbuhan penerimaan pajak dan konsumsi di Indonesia
tahun
2013 sampai 2017

Sumber: Badan Pusat Statistik dan Direktorat Jenderal Pajak (Data Diolah)

Dari grafik di atas terlihat bahwa pertumbuhan penerimaan pajak tak selalu sejalan dengan pertumbuhan konsumsi masyarakat. Contohnya, pada tahun 2015 pertumbuhan penerimaan pajak mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya sedangkan pertumbuhan konsumsi masyarakat mengalami penurunan. Begitu pula pada tahun 2017 pertumbuhan penerimaan pajak mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya, namun pertumbuhan konsumsi masyarakat mengalami penurunan, artinya hubungan antara pertumbuhan penerimaan pajak dan pertumbuhan konsumsi masyarakat berhubungan negatif. Padahal sektor konsumsi rumah tangga merupakan salah satu sektor penyumbang penerimaan pajak, dalam hal ini PPN. Jika kita mengacu pada pengertian PPN, dimana PPN adalah pajak atas konsumsi barang dan jasa, maka seharusnya penerimaan PPN terhadap tingkat konsumsi masyarakat memiliki hubungan positif. Dalam beberapa kesempatan pemerintah selalu menyatakan bahwa, pertumbuhan penerimaan PPN yang cukup signifikan merefleksikan daya beli masyarakat.

Jika pendapatan disposabel meningkat, maka konsumsi juga meningkat. Hanya saja peningkatan tersebut tidak sebesar peningkatan pendapatan disposable, sebagaimana teori Keynes yang menjelaskan bahwa konsumsi saat ini (*current consumption*) sangat dipengaruhi oleh pendapatan disposabel saat ini (*current disposable income*). Menurut Keynes, ada batas konsumsi minimal yang tidak tergantung tingkat pendapatan. Artinya, tingkat konsumsi tersebut harus terpenuhi, walaupun tingkat pendapatan sama dengan nol. Itulah yang disebut dengan konsumsi otonomus (*autonomous consumption*), (Samuelson dan nordhaus, 2010).

Selain sektor konsumsi, Investasi juga dikatakan berpengaruh terhadap penerimaan pajak. Kegiatan investasi atau penanaman modal asing langsung

(*foreign direct investment*) telah menjadi salah satu ciri yang menonjol (*striking feature*) dalam perekonomian dunia dewasa ini. Dengan berbagai motif dan alasan, banyak perusahaan multinasional (*multinational company*) dan perusahaan transnasional (*transnational company*) melakukan penanaman modal secara langsung di luar negeri. Di samping adanya pertumbuhan volume aliran modal asing, juga terjadi penyebaran modal asing yang semakin luas, baik diantara negara-negara asal (*home countries*) maupun di negara-negara tujuan (*host countries*), (Mockler, 1999).

Investasi diyakini sebagai salah satu faktor yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Implikasi kebijakan dari adanya hubungan timbal balik antara tingkat investasi dan tingkat pendapatan tersebut adalah pada pembuatan proyeksi kebutuhan investasi tahunan dan target pertumbuhan ekonomi. Dengan memegang asumsi bahwa hubungan timbal balik tersebut terjadi, maka dalam membuat proyeksi investasi harus memperhitungkan variabel pertumbuhan ekonomi; dan sebaliknya dalam memproyeksikan angka pertumbuhan ekonomi, variabel investasi harus dijadikan salah satu faktor penentu.

Melihat peranan modal asing yang sangat potensial di dalam mempercepat pertumbuhan dan transformasi ekonomi, membuat negara-negara berkembang sangat antusias untuk menarik sebanyak mungkin modal asing. Berbagai kebijakan diambil untuk menciptakan iklim yang kondusif bagi masuknya modal asing. Sebagai upaya untuk tetap eksis dalam perekonomian global, beberapa negara terutama yang mempunyai sumber daya alam (*natural resources*) terbatas, memanfaatkan sistem perpajakan sebagai salah satu instrumen untuk menarik investasi asing. Beberapa keringanan dan kemudahan pajak disediakan mulai dari tata cara dan prosedur sampai dengan tarif pajak. Bila perlu sebuah negara tidak segan-segan mengenakan tarif pajak yang sangat

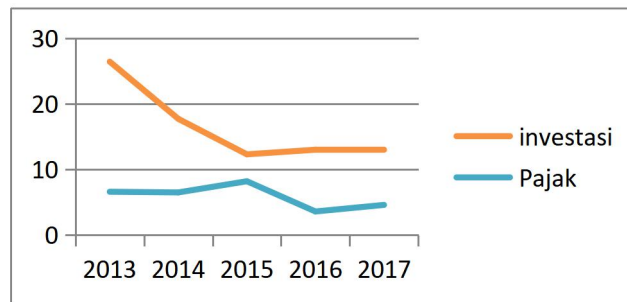
rendah dengan tujuan agar arus modal asing dapat masuk dan pada akhirnya secara makro akan memberikan keuntungan pada negara tersebut.

Sebagai negara berkembang, Indonesia memerlukan investasi asing dalam pembangunan ekonominya. Hal ini disadari betul oleh pemerintah sehingga pada tahun 1967 dalam rangka menarik investasi asing, pemerintah memberlakukan Undang-undang Penanaman Modal Asing (PMA) yaitu Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 tanggal 10 Januari 1967 tentang Penanaman Modal Asing. Dengan diterbitkannya Undang-undang ini maka dibukalah “kran” investasi asing di Indonesia yang keberadaan dan perkembangannya dapat dilihat sampai saat ini.

Berdasarkan kenyataan di atas, upaya untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif mutlak dilakukan melalui berbagai peraturan dan kebijakan, termasuk bidang perpajakan di dalamnya. Menurut laporan UNCTAD pada tahun 1996 saja tercatat sebanyak 103 negara menawarkan insentif pajak dalam rangka menarik investasi asing (Easson, 2004).

Sejak saat itu angka ini secara pasti terus bertambah, walaupun beberapa ahli memberikan pendapat dan sarannya untuk membatasi pemberian insentif pajak. Paling tidak ada tiga alasan utama yang diberikan oleh para pengambil kebijakan di negara-negara yang memberlakukan insentif pajak, yaitu negara lainnya juga memberlakukan hal yang sama (insentif pajak), pengambil kebijakan di negara yang bersangkutan tidak sependapat dengan saran yang diberikan para ahli perpajakan untuk tidak memberlakukan insentif pajak, dan insentif pajak merupakan cara yang paling praktis dan dimungkinkan untuk menarik investasi asing. Dalam tataran yang lebih khusus, pemberian insentif pajak untuk penanaman modal asing dimaksudkan dalam rangka pembangunan atau pengembangan wilayah atau daerah tertentu (*regional development*), penciptaan

lapangan kerja (*employment creation*), alih teknologi (*technology transfer*), penggalakan ekspor (*export promotion*), dan mendorong kegiatan ekspor di kawasan pengembangan terpadu atau berikat (*free-trade or export processing zones*), (Thuronyi, 1998).



Grafik 1.2
Presentase Pertumbuhan penerimaan Pajak dan investasi di Indonesia
tahun
2013 sampai 2017

Sumber: Badan Pusat Statistik dan Direktorat Jenderal Pajak (Data Diolah)

Berdasarkan grafik 1.2 menunjukkan bahwa pertumbuhan investasi memberikan pengaruh yang pada penerimaan pajak. Hal ini bisa dilihat pada kecenderungan pada kedua grafik diatas, dimana grafik investasi pada tahun 2013 sampai 2013 sampai 2015 yang menunjukkan tren yang menurun, dan penerimaan pajak juga menunjukkan tren yang menurun.

Terakhir, sektor perdagangan internasional juga menjadi salah satu sektor penyumbang dalam penerimaan pajak. Pemungutan pajak ekspor-impor menjadi salah satu sumber penerimaan pajak pada sektor perdagangan internasional ini. pajak perdagangan internasional adalah semua penerimaan negara yang berasal dari bea masuk dan pajak atau pungutan atas ekspor. Struktur pendapatan negara hingga saat ini masih didominasi oleh penerimaan perpajakan, terutama penerimaan pajak dalam negeri dari sektor nonmigas.

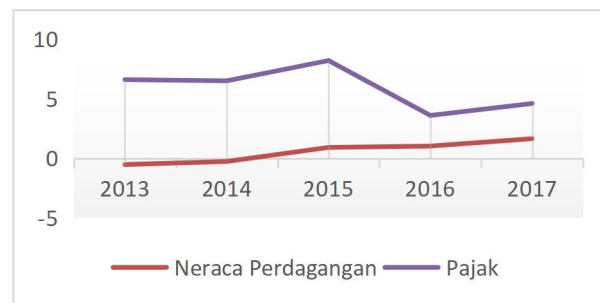
Pendapatan perpajakan Perdagangan Internasional adalah semua

penerimaan negara yang berasal dari pendapatan bea masuk dan pendapatan bea keluar. Dalam UU Nomor 23 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014.

Namun, permasalahan defisit neraca perdagangan menjadi salah satu hambatan dalam pengoptimalan penarikan pajak pada sektor ini. Akibat defisit neraca pembayaran pemerintah membuat aturan yang longgar yang mengakibatkan pemungutan pajak pada sektor perdagangan internasional kurang optimal khususnya pada sektor ekspor. Pemerintah telah melakukan setidaknya beberapa kebijakan dalam bidang perpajakan untuk memberikan insentif kepada para pelaku usaha dan masyarakat secara keseluruhan untuk berperilaku lebih produktif. Diawali dengan UU No. 42 tahun 2009 pasal 7 ayat 2 yang mengatur bahwa tarif pajak Pertambahan Nilai untuk ekspor adalah sebesar 0% . Kemudian pada pasal 8 ayat 2 undang-undang ini bahwa ekspor barang kena pajak yang tergolong mewah juga dikenakan pajak dengan tarif 0%. Sementara selain ekspor (yaitu impor, maupun transaksi jual beli dalam negeri), tarif yang dikenakan adalah 10%, bahkan bisa lebih dari itu bila objeknya adalah barang mewah. Jadi memang sejak awal pemerintah melalui pajak juga sudah mengupayakan perilaku produktif pada masyarakat terutama untuk kegiatan ekspor.

Lebih lanjut, melalui PMK 110/PMK.010/2018 pemerintah memberlakukan kenaikan tarif pajak Penghasilan 22 Impor. Namun, yang perlu diperhatikan adalah bahwa dengan adanya PPh 22 impor ini maka perusahaan harus menanggung *opportunity loss* atas kegiatan impor yang dilakukan, karena arus kas perusahaan terpengaruh, perusahaan harus menyetorkan sejumlah uang ke negara pada saat impor meskipun akan dikembalikan melalui mekanisme kredit pajak di akhir tahun. Dengan kata lain, PPh 22 impor berperan dalam menurunkan kegiatan impor dengan memberikan efek *opportunity loss* tersebut.

Dengan dinaikkannya PPh 22 Impor maka *opportunity loss* ini juga akan semakin besar.



Grafik 1.3
Presentase Pertumbuhan penerimaan Pajak dan *Trade Openness*
di Indonesia tahun 2013 sampai 2017

Sumber: Badan Pusat Statistik dan Direktorat Jenderal Pajak (Data Diolah)

Pajak perdagangan internasional terdiri dari kebijakan tarif bea masuk dan bea keluar. Penerimaan bea masuk atau bea keluar meningkat seiring dengan meningkatnya nilai impor/ekspor perdagangan.

Terdapat tiga manfaat dari adanya perdagangan internasional. Pertama, suatu negara mampu memperoleh komoditas yang tidak dapat diproduksi di dalam negeri. Kedua, negara yang bersangkutan dapat memperoleh keuntungan dari spesialisasi. Ketiga, adanya perluasan pasar produk suatu negara dan penambahan dalam pendapatan nasional nantinya dapat meningkatkan output dan laju pertumbuhan ekonomi, (Salvatore, 2014)

Grafik 1.4 menunjukkan bahwa peningkatan kinerja neraca perdagangan ikut mempengaruhi kinerja penerimaan pajak. Hal ini karena peningkatan neraca perdagangan mengindikasikan semakin baiknya perdagangan luar negeri Indonesia. Sehingga akan mempengaruhi penerimaan pajak dari sektor perdagangan internasional ini. Dalam hal ini hubungan antara perdagangan internasional dengan penerimaan pajak adalah positif. Ketika neraca

perdagangan menunjukkan tren kenaikan maka akan menyebabkan kenaikan penerimaan pajak. Namun, tidak selamanya pertumbuhan neraca perdagangan akan menyebabkan pertumbuhan penerimaan pajak pula. Contohnya pada tahun 2016, pertumbuhan penerimaan pajak anjlok dari tahun sebelumnya yaitu 8.2% menjadi 3.6%. Hal ini disebabkan oleh harga-harga komoditas yang rendah dan juga pertumbuhan perdagangan internasional yang rendah dari tahun tahun sebelumnya, dimana hanya bertumbuh 2% hingga 3% saja.

Berdasarkan uraian diatas, untuk mengetahui bagaimana perkembangan *tax buoyancy* di indonesia maka penulis memilih dan tertarik untuk mengangkat masalah mengenai “**Analisis *tax buoyancy* di Indonesia**”.

1.2 Rumusan Masalah

Sejalan dengan latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya, maka pertanyaan penelitian yaitu:

- 1) Apakah konsumsi berpengaruh terhadap *tax buoyancy* di Indonesia?
- 2) Apakah investasi berpengaruh terhadap *tax buoyancy* di Indonesia?
- 3) Apakah *trade openness* berpengaruh terhadap *tax buoyancy* di Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh konsumsi terhadap *tax buoyancy* di Indonesia.
- 2) Untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh investasi terhadap *tax buoyancy* di Indonesia.

- 3) Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh *trade openness* terhadap *tax buoyancy* di Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian diharapkan dapat bermanfaat untuk:

- 1) Sebagai pelengkap dan bahan tambahan untuk penelitian sebelumnya, serta bahan referensi bagi peneliti selanjutnya yang akan meneliti mengenai hal berkaitan dan relevan dengan penelitian ini.
- 2) Digunakan sebagai salah satu sumber informasi dan bahan pertimbangan kepada pemerintah Indonesia tingkat pusat dalam pengambilan kebijakan, terkait dengan pengoptimalan penerimaan pajak.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

Dalam penelitian berfokus pada pembahasan tentang konsumsi, *trade openness*, investasi, dan pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi dan perpajakan nasional (*tax buoyancy*).

2.1.1 Tax Bouyancy

Tax buoyancy atau elastisitas penerimaan pajak terhadap pertumbuhan ekonomi/PDB adalah indikator untuk mengukur efisiensi dan efektivitas pertumbuhan penerimaan pajak dalam menanggapi pertumbuhan produk domestik bruto/PDB. Pajak dikatakan elastis jika penerimaan pajak meningkat lebih dari proporsional sebagai respons terhadap kenaikan Produk Domestik Bruto (PDB).

Elastisitas menyangkut respon ataupun reaksi suatu variabel terhadap perubahan persentase pada variabel lain (Marshall, 1920). Tingkat kepekaan atau responsivitas penerimaan pajak terhadap pendapatan nasional atau pertumbuhan perekonomian suatu Negara adalah variabel penting dalam memproyeksikan penerimaan pajak, dan merupakan kriteria dasar untuk pajak yang baik. Responsivitas ini diukur dengan dua konsep, elastisitas pajak yang mengukur respon otomatis penerimaan pajak terhadap perubahan *tax base*,

tax rate dan *tax buoyancy* yang mengukur respon penerimaan pajak terhadap perubahan pendapatan nasional, dalam hal ini Produk Domestik Bruto (PDB).

2.1.2 Teori Pajak

Pajak merupakan perwujudan dari pengabdian dan peran serta wajib pajak untuk secara langsung dan bersama-sama ikut melaksanakan kewajiban perpajakan yang diperlukan untuk pembiayaan Negara dan pembangunan Nasional. Tanggung jawab atas pelaksanaan pemungutan pajak sebagai cermin kewajiban masyarakat itu sendiri. Dalam hal ini aparat perpajakan sesuai dengan fungsinya berkewajiban melakukan pembinaan, pelayanan, dan pengawasan terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan berdasarkan ketentuan yang digariskan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan atau dalam Ketentuan Umum perpajakan (KUP).

Pajak sebenarnya adalah utang, yaitu utang anggota masyarakat kepada masyarakat. Utang menurut pengertian hukum adalah perikatan (*verbinten*). Perikatan adalah istilah hukum yang perlu dipahami maknanya. Ilmu hukum membahas timbulnya dan hapusnya perikatan (utang pajak), membahas daluwarsa, membahas preferensi utang, paksa, sita, peradilan, pelanggaran, dan sebagainya. Pembangunan nasional adalah kegiatan yang berlangsung terus menerus dan berkesinambungan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat baik materil maupun spiritual. Untuk dapat merealisasikan tujuan tersebut perlu banyak memperhatikan masalah pembiayaan-pembiayaan pembangunan. Salah satu untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa atau negara dalam pembiayaan pembangunan yaitu menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri berupa pajak. Pajak digunakan untuk membiayai pembangunan yang berguna bagi kepentingan bersama. Definisi atau pengertian pajak seperti dikutip oleh Mardiasmo dari Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H., adalah iuran rakyat

kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Pengetahuan pajak adalah informasi pajak yang dapat digunakan wajib pajak sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan, dan untuk menempuh arah atau strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya dibidang perpajakan (Carolina, 2009).

Konsep Pengetahuan atau pemahaman pajak menurut Rahayu (2010) yaitu wajib pajak harus meliputi: Pengetahuan mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara perpajakan, Pengetahuan mengenai Sistem perpajakan di Indonesia, Pengetahuan mengenai Fungsi perpajakan.

Fallan (1999) yang dikutip kembali oleh Rahayu (2010) memberikan kajian pentingnya aspek pengetahuan perpajakan bagi wajib pajak sangat mempengaruhi sikap pajak terhadap sistem perpajakan yang adil. Dengan kualitas pengetahuan yang semakin baik akan memberikan sikap memenuhi kewajiban dengan benar melalui adanya sistem perpajakan sesuatu negara yang dianggap adil. Kesadaran wajib pajak akan meningkat bilamana dalam masyarakat muncul persepsi terhadap pajak. Dengan meningkatnya pengetahuan perpajakan masyarakat melalui pendidikan perpajakan baik formal maupun non formal akan berdampak positif terhadap pemahaman dan kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak. Dengan penyuluhan perpajakan secara intensif dan berkelanjutan akan meningkatkan pemahaman wajib pajak tentang kewajiban membayar pajak sebagai wujud gotong royong nasional dalam menghimpun dana untuk kepentingan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan nasional.

Berdasarkan Pasal 1 angka 10 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009,

definisi pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Menurut Adiasa (2013) ada beberapa pengertian tentang pajak daerah antara lain : Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dengan pengaturan dari daerah sendiri; Pajak yang dipungut berdasarkan peraturan nasional tetapi penetapan tarifnya dilakukan oleh Pemerintah Daerah; Pajak yang ditetapkan dan dipungut oleh Pemerintah Daerah; Pajak yang dipungut dan diadministrasikan oleh pemerintah pusat tetapi hasilnya diberikan kepada, dibagihasilkan, atau dibebani pungutan tambahan oleh Pemerintah Daerah.

Fungsi pajak lebih kepada manfaat pokok atau kegunaan pokok dari pajak itu sendiri, Pajak mempunyai peranan yang sangat penting untuk kehidupan bernegara, karena pajak merupakan sumber pendapatan Negara dan pajak akan digunakan untuk membiayai APBN, maka beberapa fungsi pajak antara lain : Fungsi Anggaran (*budgetair*), kegunaan pajak sebagai alat untuk memasukkan dana secara optimal ke kas Negara berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku, jadi pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran Negara; Fungsi mengatur (*regulerend*), yaitu suatu fungsi di mana pajak dipergunakan oleh pemerintah sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu, dan merupakan fungsi tambahan, jadi sebagai pelengkap dari fungsi utama pajak; Fungsi stabilitas, yaitu dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan, hal ini bisa dilakukan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien; Fungsi retribusi pendapatan, Pajak yang sudah dipungut oleh Negara digunakan

untuk membiayai kepentingan umum.

2.1.3 Teori Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan output perkapita dalam jangka panjang (Boediono, 1999). Pengertian tersebut mencakup tiga aspek. yaitu: proses, *output* perkapita dan jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu proses, bukan gambaran ekonomi pada suatu saat. Mencerminkan aspek dinamis dari suatu perekonomian, yaitu melihat bagaimana suatu perekonomian berkembang atau berubah dan waktu ke waktu. Pertumbuhan ekonomi berkaitan dengan kenaikan output per kapita. Dalam hal ini berkaitan dengan *output* total *GDP* dan jumlah penduduk, karena output per kapita adalah output total dibagi dengan jumlah penduduk. Jadi proses kenaikan *output* perkapita harus dianalisa dengan melihat apa yang terjadi dengan *output* total disatu pihak, dan jumlah penduduk di pihak lain. Dengan perkataan lain, pertumbuhan ekonomi mencakup pertumbuhan *GDP* total dan pertumbuhan penduduk. Aspek ketiga dari definisi pertumbuhan ekonomi adalah perspektif waktu jangka waktu suatu perekonomian dikatakan mengalami pertumbuhan apabila dalam waktu yang cukup lama (10, 20 atau 50 tahun. atau bahkan lebih lama lagi) mengalami kenaikan output per kapita. Tentu saja dalam waktu tersebut bisa terjadi kemerosotan output per kapita, karena gagal panen misalnya, tetapi apabila dalam waktu yang cukup panjang tersebut output per kapita menunjukkan kecenderungan naik maka dapat kita katakan bahwa pertumbuhan ekonomi terjadi. Beberapa ekonom berpendapat bahwa adanya kecenderungan naik bagi output per kapita saja tidak cukup, tapi kenaikan output harus bersumber dari proses intern perekonomian tersebut. Dengan kata lain proses pertumbuhan ekonomi harus bersifat self-generating, yang berarti bahwa

proses pertumbuhan itu sendiri menghasilkan kekuatan bagi timbulnya kelanjutan pertumbuhan dalam periode periode selanjutnya.

Teori pertumbuhan ekonomi bisa didefinisikan sebagai penjelasan mengenai faktor-faktor apa yang menentukan kenaikan output per kapita dalam jangka panjang, dan penjelasan mengenai bagaimana faktor-faktor tersebut berinteraksi satu sama lain, sehingga terjadi proses pertumbuhan (Boediono, 1999). Di dalam ilmu ekonomi tidak hanya terdapat suatu teori pertumbuhan, tetapi terdapat banyak teori pertumbuhan. Para ekonom mempunyai pandangan atau persepsi yang tidak selalu sama mengenai proses pertumbuhan suatu perekonomian. Teori-teori pertumbuhan dapat dikelompokkan kedalam beberapa teori, berikut diantara beberapa teori pertumbuhan ekonomi menurut ahli.

2.1.3.1 Teori Pertumbuhan Ekonomi Klasik

Teori pertumbuhan dari Adam Smith, David Ricardo, Thomas Robert Malthus. Adam Smith adalah ahli ekonomi klasik yang pertama kali mengemukakan mengenai pentingnya kebijaksanaan *lisezfaire* atas sistem mekanisme untuk memaksimalkan tingkat perkembangan ekonomi suatu masyarakat. Para ekonom yang mempelajari pertumbuhan ekonomi telah menemukan bahwa mesin kemajuan ekonomi harus bertengger di atas empat roda yang sama, baik di Negara miskin atau Negara kaya. Keempat faktor pertumbuhan itu, adalah : Sumber daya manusia (penawaran tenaga kerja, pendidikan, disiplin, motivasi), Sumber daya alam (tanah, mineral, bahan bakar, kualitas lingkungan), Pembentukan modal (mesin, pabrik, jalan), Teknologi (sains, rekayasa, manajemen, kewirausahaan).

Menurut Ricardo peranan teknologi akan dapat menghambat berjalannya *the law of diminishing return*, walaupun teknologi bersifat kaku, dan hanya dapat berubah dalam jangka panjang. Bagi kaum klasik keadaan stationer merupakan

keadaan ekonomi sudah mapan dimana masyarakat sudah hidup sejahtera dan tidak ada lagi pertumbuhan yang berarti.

Menurut T.R Malthus berpendapat bahwa tekanan jumlah penduduk akan mendorong ekonomi pada keadaan para buruh berada pada taraf nafkah hidup minimum. Malthus beralasan bahwa manakala upah berada di atas nafkah hidup, jumlah penduduk akan meningkat. Upah dibawah nafkah hidup akan menyebabkan angka kematian tinggi dan jumlah penduduk berkurang, hanya pada taraf upah setara dengan nafkah hidup dapat terjadi ekuilibrium jumlah penduduk yang stabil.

2.1.3.2 Teori Pertumbuhan Ekonomi Neo-Klasik

Teori pertumbuhan Robert Solow, model pertumbuhan neoklasik berfungsi sebagai alat dasar untuk memahami proses pertumbuhan Negara maju dan telah diterapkan dalam studi empiris mengenai sumber pertumbuhan ekonomi. Pendapat neo-klasik tentang perkembangan ekonomi dapat diikhtisarkan sebagai berikut (Suryana 2000): Adanya akumulasi kapital merupakan faktor penting dalam pembangunan ekonomi, Perkembangan merupakan proses yang gradual, Perkembangan merupakan proses yang harmonis dan kumulatif, Adanya pikiran yang optimis terhadap perkembangan, Aspek internasional merupakan faktor bagi perkembangan.

Model pertumbuhan neoklasik menjelaskan ekonomi dengan output homogen tunggal yang diproduksi oleh dua jenis analisis, yaitu modal dan tenaga kerja. Unsur-Unsur baru utama dari model pertumbuhan neoklasik adalah modal dan perubahan teknologi. Pada proses pertumbuhan ekonomi, para ekonom menekankan kebutuhan akan penumpukan modal (*capital deepening*), yang merupakan proses dengan kuantitas modal buruh yang meningkat sepanjang waktu.

Menurut neo-klasik tingkat bunga dan tingkat pendapatan menentukan tingginya tingkat tabungan. Pada tingkat teknik tertentu, tingkat bunga akan menentukan tingkat investasi. Apabila permintaan terhadap investasi berkurang maka tingkat bunga turun, hasrat menabung turun, Perkembangan teknologi merupakan salah satu faktor pendorong kenaikan pendapatan nasional.

2.1.3.3 Teori Pertumbuhan Ekonomi Modern

Menurut Rostow pembangunan ekonomi adalah suatu transformasi suatu masyarakat tradisional menjadi masyarakat modern, melalui tahapan: Masyarakat, Prasyarat lepas landas, Tahap kematangan, Masyarakat berkonsumsi tinggi.

Kuznet (1966) mendefinisikan pertumbuhan ekonomi sebagai kemampuan jangka panjang untuk menyediakan berbagai jenis barang ekonomi yang terus meningkat kepada masyarakat. Kemampuan ini tumbuh atas dasar kemajuan teknologi, institusional dan ideologis yang diperlukannya.

Harrod-Domar (dalam Suryana, 2000) mengembangkan analisa Keynes yang menekankan tentang perlunya penanaman modal dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi. Setiap usaha ekonomi harus menyelamatkan proporsi tertentu dari pendapatan nasional yaitu untuk menambah stok modal yang akan digunakan dalam investasi baru. Menurut Harrod-Domar terdapat hubungan ekonomi yang langsung antar besarnya stok modal (C) dan jumlah produksi nasional (Y).

2.1.4 Teori Konsumsi

Konsumsi merupakan tindakan pelaku ekonomi, baik individu maupun kelompok, dalam menggunakan komoditas berupa barang maupun jasa untuk memenuhi kebutuhannya. Secara agregat, konsumsi merupakan penjumlahan

dari pengeluaran seluruh rumah tangga yang ada dalam suatu perekonomian. Dengan mengetahui total pengeluaran suatu perekonomian, maka akan dapat diketahui beberapa masalah penting yang muncul dalam perekonomian, seperti pemerataan pendapatan, efisiensi penggunaan sumber daya dalam suatu perekonomian, masalah-masalah lainnya. Dengan demikian, kita dapat menganalisis dan menentukan kebijakan ekonomi guna memperbaiki atau meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Secara umum, pengeluaran konsumsi terbagi menjadi konsumsi pemerintah dan konsumsi rumah tangga. Konsumsi rumah tangga memiliki porsi yang lebih besar dalam pengeluaran agregat jika dibandingkan dengan konsumsi pemerintah, Konsumsi rumah tangga bersifat endogen, dalam arti besarnya konsumsi rumah tangga berkaitan erat dengan faktor-faktor lain yang mempengaruhinya.

Teori Konsumsi Keynes dikenal dengan Hipotesis Pendapatan Absolut (*Absolute Income Hypotesis*) yang pada intinya menjelaskan bahwa konsumsi seseorang dan atau masyarakat secara absolut ditentukan oleh tingkat pendapatan, walaupun ada faktor lain yang juga menentukan, maka menurut Keynes kesemuanya itu tidak berarti apa-apa dan sangat tidak menentukan.

Teori Konsumsi Keynes didasarkan pada 3 postulat yaitu: *Pertama*, Konsumsi meningkat apabila pendapatan meningkat, akan tetapi besarnya peningkatan konsumsi tidak akan sebesar peningkatan pendapatan, oleh karenanya adanya batasan dari Keynes sendiri yaitu bahwa kecenderungan mengkonsumsi marginal atau *MPC (Marginal Propensity to Consume)* adalah antara nol dan satu, dan pula besarnya perubahan konsumsi selalu diatas 50% dari besarnya perubahan pendapatan. *Kedua*, Rata-rata kecenderungan mengkonsumsi atau *APC (Avarage Propensity to Consume)* akan turun apabila

pendapatan naik, karena peningkatan pendapatan selalu lebih besar daripada peningkatan konsumsi, sehingga pada setiap naiknya pendapatan pastilah akan memperbesar tabungan. Dengan demikian dapat dibuatkan satu pernyataan lagi bahwa setiap terjadi peningkatan pendapatan maka pastilah rata-rata kecenderungan menabung akan semakin tinggi. *Ketiga*, Bahwa pendapatan adalah merupakan determinan (faktor penentu utama) dari konsumsi. Faktor lain dianggap tidak berarti.

Keynes menjelaskan bahwa konsumsi saat ini (*current consumption*) sangat dipengaruhi oleh pendapatan disposabel saat ini (*current disposable income*). Menurut Keynes, ada batas konsumsi minimal yang tidak tergantung tingkat pendapatan. Artinya, tingkat konsumsi tersebut harus terpenuhi, walaupun tingkat pendapatan sama dengan nol. Itulah yang disebut dengan konsumsi otonomus (*autonomous consumption*). Jika pendapatan disposabel meningkat, maka konsumsi juga meningkat. Hanya saja peningkatan tersebut tidak sebesar peningkatan pendapatan disposabel (Samuelson dan nordhaus, 2010).

2.1.5 Teori Investasi

Investasi adalah suatu istilah dengan beberapa pengertian yang berhubungan dengan keuangan dan ekonomi. Istilah tersebut berkaitan dengan akumulasi suatu bentuk aktiva dengan suatu harapan mendapatkan keuntungan dimasa depan. Terkadang, investasi disebut juga sebagai penanaman modal. Badan Pusat Statistik mengartikan investasi sebagai suatu kegiatan penanaman modal pada berbagai kegiatan ekonomi dengan harapan untuk memperoleh keuntungan (*benefit*) pada masa-masa yang akan datang.

John Maynard Keynes mendasarkan teori tentang permintaan investasi atas konsep efisiensi marjinal kapital (*Marginal Efficiency of Capital* atau *MEC*). Sebagai suatu definisi kerja, MEC dapat didefinisikan sebagai tingkat perolehan

bersih yang diharapkan (*Expected net rate of return*) atau pengeluaran kapital tambahan.

Menurut Jhingan (2000) bahwa kunci pada investasi di dalam proses pertumbuhan ekonomi, khususnya mengenai watak ganda yang dimiliki investasi. Pertama, investasi menciptakan pendapatan, kedua investasi memperbesar kapasitas produksi perekonomian dengan cara meningkatkan stok modal. Yang pertama dapat disebut dampak permintaan, yang kedua dampak penawaran investasi.

Investasi adalah usaha mencakup pembelian barang kapital saat ini atas dasar ekspektasi adanya penerimaan di masa mendatang. Mengingat penerimaannya dimasa mendatang, calon investor harus mengestimasi besarnya penerimaan untuk tahun ini, tahun depan, dan seterusnya sepanjang usia produktif dari investasi yang dilakukan.

Pada dasarnya investasi didefinisikan sebagai semua pengeluaran pada barang-barang kapital riil. Akan tetapi dalam bahasa sehari-hari investasi juga mencakup pembelian aktiva. Secara umum pengeluaran investasi berkaitan dengan pengelolaan sumber daya yang ada saat ini untuk diperoleh penggunaan atau manfaatnya pada saat yang akan datang (Waluyo, 2001). Bila dilihat dari jenisnya, investasi dapat dibagi menjadi dua macam yaitu investasi riil dan investasi finansial. Investasi riil yaitu investasi terhadap barang-barang tahan lama (barang barang modal) yang akan digunakan dalam proses produksi. Jenis investasi riil ini masih terbagi lagi menjadi tiga komponen investasi : Investasi tetap perusahaan (*bussines fixed investment*), investasi untuk perumahan (*residential construction*), investasi perubahan bersih persediaan perusahaan (*net change in bussines inventory*).

Sedangkan investasi finansial adalah investasi terhadap surat-surat

berharga, misalnya pembelian saham, obligasi, dan surat bukti hutang lainnya. Perkataan investasi merupakan salah satu istilah ekonomi yang selalu di gunakan orang awam, Teori ekonomi mengartikan atau mendefenisikan investasi sebagai persen pengeluaran-pengeluaran untuk membeli barang-barang modal dan peralatan-peralatan produksi dengan tujuan untuk mengganti dan terutama menambah barang barang modal dalam perekonomian yang akan digunakam untuk memproduksi barang dan jasa dimasa depan. Dengan perkataan lain dalam teori ekonomi investasi berarti kegiatan pembelanjaan untuk meningkatkan kapasitas memproduksi sesuatu perekonomian (Sadono Sukirno 2000).

Berdasarkan teori manajemen portofolio, secara sederhana investasi dapat diartikan sebagai cara penanaman modal, yang bertujuan untuk mendapatkan manfaat atau keuntungan tertentu sebagai hasil penanaman modal tersebut. Dalam setiap keputusan investasi. sebagai seorang yang rasional. perhatian investor akan diarahkan pada tingkat pengembalian (*rate of return*) investasi. Ia akan memilih investasi yang menjanjikan tingkat keuntungan tertinggi. karena investasi yang akan dilakukan mengandung unsur ketidakpastian, maka investor harus mempertimbangkan faktor resiko.

Berdasarkan teori ekonomi, investasi berarti pembelian (dan produksi) dari modal barang yang tidak dikonsumsi tetapi digunakan untuk produksi yang akan datang (barang produksi). Contohnya membangun rel kereta api atau pabrik. Investasi adalah suatu komponen dari PDB artinya PDB adalah hasil dari penjumlahan konsumsi, investasi, dan pengeluaran pemerintah, pengeluaran pemerintah adalah selisih dari ekspor dan impor. Fungsi investasi pada aspek tersebut dibagi pada investasi *non-residential* (seperti pabrik dan mesin) dan investasi residential (rumah baru).

Investasi adalah suatu fungsi pendapatan dan tingkat bunga. Suatu

pertambahan pada pendapatan akan mendorong investasi yang lebih besar, dimana tingkat bunga yang lebih tinggi akan menurunkan minat untuk investasi sebagaimana hal tersebut akan lebih mahal dibandingkan dengan meminjam uang. Walaupun jika suatu perusahaan lain memilih untuk menggunakan dananya sendiri untuk investasi, tingkat bunga menunjukkan suatu biaya kesempatan dari investasi dana tersebut daripada meminjamkan untuk mendapatkan bunga.

2.1.5.1 Jenis-Jenis Investasi

Secara umum terdapat empat jenis investasi yaitu : *Pertama*, Investasi yang terdorong (*induced investment*) dan investasi otonom (*autonomous investment*). Investasi yang terdorong (*induced investment*) yakni investasi yang sangat dipengaruhi oleh tingkat pendapatan. Investasi ini diadakan akibat adanya pertambahan permintaan. Pertambahan permintaan yang mana adalah akibat pertambahan pendapatan, jelasnya apabila pendapatan bertambah maka pertambahan permintaan akan digunakan untuk tambahan konsumsi. Sedangkan pertambahan konsumsi pada dasarnya adalah tambahan permintaan dan apabila ada tambahan permintaan, maka akan terdorong berdirinya pabrik baru atau memperluas pabrik lama untuk dapat memenuhi tambahan permintaan tersebut. Investasi otonom (*autonomous investment*), yakni investasi besar kecilnya tidak dipengaruhi oleh pendapatan tetapi dapat berubah karena adanya perubahan-perubahan faktor-faktor diluar pendapatan seperti tingkat teknologi kebijaksanaan pemerintah, harapan para pengusaha dan sebagainya. investasi ini dilaksanakan atau diadakan secara bebas, artinya investasi diadakan bukan karena pertambahan permintaan efektif. Besarnya investasi otonom tidak tergantung kepada besar kecilnya pendapatan nasional atau daerah. investasi otonom berarti pembentukan modal yang tidak dipengaruhi oleh pendapatan nasional.

Dengan perkataan lain tinggi rendahnya pendapatan nasional tidak menentukan jumlah investasi yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan.

Kedua, Publik invesment dan Private investment. Public invesment adalah investasi atau penanaman modal yang dilakukan oleh pemerintah. Yang dimaksud pemerintah disini adalah baik pemerintah pusat atau daerah dan sifatnya resmi. Sedangkan *private invesment* adalah investasi yang dilaksanakan oleh swasta, dimana keuntungan yang menjadi prioritas utama berbeda dengan publik invesment daerah untuk melayani dan menciptakan kesejahteraan bagi rakyat banyak.

Ketiga, Domestic invesment adalah penanaman modal dalam negeri, sedangkan *foreign invesment* adalah penanaman modal asing.

Keempat, Gross invesment dan Net investment. Gross invesment adalah total seluruh investasi yang diadakan atau dilaksanakan pada suatu waktu. Jadi mencakup segala jenis investasi, baik itu *autonomous* maupun *induced* atau *private* maupun *public*. Pada dasarnya seluruh investasi yang dilakukan disuatu negara pada periode tertentu dinamakan *gross invesment*. *Net invesment* (investasi netto) adalah selisih antara investasi bruto dengan penyusutan. Apabila investasi bruto tahun ini adalah Rp 25 juta sedangkan penyusutan yang terjadi selama setahun yang lalu adalah sebesar Rp 10 juta, maka itu berarti bahwa investasi netto adalah sebesar Rp 15 juta.

2.1.5.2 Efek Investasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Setiap kegiatan maupun aktivitas di dalam perekonomian selalu mempunyai keterkaitan dengan aktivitas lainnya. Investasi merupakan salah satu faktor yang penting bagi kelangsungan proses pembangunan atau pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Pembangunan ekonomi melibatkan kegiatan-kegiatan produksi di semua sektor ekonomi. Untuk keperluan tersebut maka dibangun

pabrik-pabrik, perkantoran, alat-alat produksi dan infrastruktur yang dibiayai melalui investasi baik berasal dari pemerintah maupun swasta. Korelasi positif antara investasi dengan pertumbuhan ekonomi diuraikan secara sederhana namun jelas di dalam model pertumbuhan ekonomi Harrod-Domar. Dalam teori ekonomi pembangunan (teori Harrold-Domar) diketahui bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi dan investasi mempunyai hubungan timbal balik yang positif. Hubungan timbal balik tersebut terjadi karena di satu pihak, semakin tinggi pertumbuhan ekonomi suatu negara, berarti semakin besar bagian dari pendapatan yang bisa di tabung, sehingga investasi yang tercipta akan semakin besar pula. Dalam kasus ini, investasi merupakan fungsi dari pertumbuhan ekonomi. Dilain pihak, semakin besar investasi suatu negara, akan semakin besar pula tingkat pertumbuhan ekonomi yang bisa dicapai. Pertumbuhan ekonomi dijadikan sebagai tolak ukur untuk mengetahui sejauh mana kegiatan ekonomi di suatu wilayah berjalan selama kurun waktu tertentu. Semakin tinggi pertumbuhan ekonomi suatu wilayah menandakan semakin bergairahnya kegiatan ekonomi diperoleh dari perkembangan PDRB atas dasar harga konstan dibandingkan tahun sebelumnya. (BPS, Sulawsi Selatan).

Pertumbuhan ekonomi (*Economic Growth*) dapat ditunjukkan oleh penambahan produksi atau pertumbuhan pendapatan nasional. Dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi dibutuhkan adanya penanaman modal atau investasi, dimana investasi merupakan kebutuhan dalam pembangunan yang menghendaki adanya pertumbuhan.

Dari segi nilainya dan proporsinya kepada pendapatan nasional, investasi perusahaan-perusahaan tidaklah sepenting seperti pengeluaran konsumsi rumah tangga. Namun demikian, kenyataan tersebut tidaklah berarti bahwa investasi perusahaan kurang penting peranannya kalau dibandingkan dengan konsumsi

rumah tangga. Diberbagai negara, terutama di negara-negara industri yang perekonomiannya sudah sangat berkembang, investasi perusahaan adalah sangat "*Volatile*" yaitu selalu mengalami kenaikan dan penurunan yang sangat besar dan merupakan sumber penting dan berlakunya fluktuasi dalam kegiatan perekonomian. Disamping itu, kegiatan investasi memungkinkan suatu masyarakat terus menerus meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan nasional dan meningkatkan taraf kemakmuran masyarakat, peranan ini bersumber dari tiga fungsi penting dari kegiatan investasi dalam perekonomian. Yang *pertama*, Investasi merupakan salah satu komponen dari pengeluaran agregat, maka kenaikan investasi akan meningkatkan agregat dan pendapatan nasional. Peningkatan seperti ini akan selalu diikuti oleh pertumbuhan dalam kesempatan kerja. *Kedua*, penambahan barang modal sebagai akibat investasi akan menambahkan kapasitas produksi dimasa depan dan perkembangan ini akan menstimulus pertumbuhan produksi nasional dan kesempatan kerja. *Ketiga*, investasi selalu diikuti oleh perkembangan teknologi. Perkembangan ini akan memberi sumbangan penting atas kenaikan produktivitas dan pendapatan perkapita masyarakat.

Investasi yang ditanamkan didalam perekonomian salah satunya di tentukan oleh adanya demand dan masyarakat, yaitu berupa konsumsi atas barang-barang konsumsi dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan merangsang tumbuhnya investasi-investasi. Karena seperti kita ketahui bahwa pendapatan yang diperoleh masyarakat akan digunakan untuk konsumsi dan sebagian lagi akan digunakan untuk ditabung sehingga apabila penggunaan pendapatan untuk konsumsi dilambangkan dengan C, dan penggunaan pendapatan untuk tabungan dilambangkan dengan S, sedangkan pendapatan yang diterima dilambangkan dengan Y, maka hasil pendapatan yang diterima masyarakat merupakan hasil

dari penjumlahan konsumsi dan tabungan.

Peran investasi swasta sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di suatu daerah, investasi swasta yang dilakukan pemerintah terdiri dari Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Penanaman Modal Asing (PMA) adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan arti seluruh modalnya dimiliki oleh warga negara dan/atau badan hukum asing. Jumlah modal yang ditanamkan dalam rangka penanaman modal asing ditetapkan sesuai dengan kelayakan ekonomi kegiatan usahanya, perusahaan PMA diberi ijin usaha selama 30 tahun sejak produksi komersial. Perpanjangan ijin dimungkinkan asalkan usahanya dinilai bermanfaat, dalam arti berdampak positif bagi ekspor, penciptaan kesempatan kerja, penerimaan pajak, lingkungan hidup, perekonomian nasional. Dalam peraturan sebelumnya, ketegasan ijin semacam itu tidak termuat secara eksplisit. Dan isi ketentuan tentang modal asing diatas tersebut timbullah serangkaian kebijaksanaan yang menyangkut investasi sebagai respon atas pro kontra terhadap penanaman modal dalam negeri.

Investasi memberikan manfaat ilmu, teknologi dan organisasi yang mutakhir yang akan mendorong perusahaan lokal untuk menginvestasikan sendiri lebih banyak pada industri pendukung atau dengan bekerjasama dengan perusahaan asing, pada kenyataanya, perusahaan asing mendorong perusahaan lokal dengan cara membantu perusahaan lokal dengan tenaga manusia, uang (modal), dan bahan baku serta memberikan pelatihan dan pengalaman kepada personil, dan investasi langsung membantu negara-negara terbelakang untuk memperoleh jumlah modal yang sangat besar. Sebagian laba dari investasi

langsung pada umumnya ditanamkan kembali ke dalam pengembangan modernisasi atau pembangunan industri yang terkait. Manfaat dari timbulnya investasi dapat dikelompokkan menjadi investasi yang bermanfaat untuk umum (publik) seperti investasi dibidang infrastruktur (jalan, jembatan, pelabuhan, pasar dan sebagainya), Investasi yang bermanfaat untuk pribadi dan rumah tangga seperti investasi yang membawa manfaat bagi pribadinya atau rumah tangga dalam rangka memenuhi keinginannya dimasa yang akan datang. Investasi bisa dimanfaatkan bagi masyarakat dengan membentuk sebuah UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah), adanya UMKM bisa meningkatkan pendapatan pada masyarakat miskin untuk memenuhi kebutuhan hidup. Usaha mikro atau rumah tangga biasanya belum punya badan hukum, serta skala usahanya relatif kecil yang bergerak dibidang industri dagang, ataupun jasa. Usaha Kecil dan Menengah (UKM) ada yang sudah berbadan hukum dan ada yang belum, dengan skala mulai dari usaha kecil sampai menengah, baik dilihat dari omset, modal usaha maupun tenaga kerja, dengan bidang usaha industri kecil, dagang ataupun jasa.

2.1.6 Perdagangan Internasional (*Trade Openness*)

Perdagangan internasional dipandang sebagai salah satu mesin penggerak pertumbuhan. Salvatore (2012) menyebutkan bahwa terdapat tiga manfaat dari adanya perdagangan internasional. Pertama, suatu negara mampu memperoleh komoditas yang tidak dapat diproduksi di dalam negeri. Kedua, negara yang bersangkutan dapat memperoleh keuntungan dari spesialisasi. Ketiga, adanya perluasan pasar produk suatu negara dan pertambahan dalam pendapatan nasional nantinya dapat meningkatkan output dan laju pertumbuhan ekonomi.

Neraca transaksi berjalan atau *current account* mencatat pengeluaran dan

penerimaan (ekspor dan impor) barang dan jasa bersama-sama dengan transfer netto. Transaksi berjalan memberikan gambaran tentang nilai transaksi yang diakibatkan oleh kegiatan perdagangan barang dan jasa (Sukirno, 2008). Neraca transaksi berjalan adalah gabungan dari neraca perdagangan (*balance of trade*) yang merupakan selisih antara ekspor dan impor barang. Kemudian neraca jasa-jasa, yang merupakan selisih ekspor jasa dan impor jasa. Beberapa teori tentang current account diantaranya adalah teori pendekatan elastisitas, teori Marshall-Lerner Condition, dan teori pendekatan intertemporal.

Teori pendekatan intertemporal. Pada awalnya perhitungan neraca transaksi berjalan merupakan selisih netto dari ekspor dan impor. Konsekuensinya, harga relatif dalam dan luar negeri menjadi determinan utama. Walaupun pendekatan elastisitas perdagangan bermanfaat untuk membuat prediksi langsung yang berguna dalam menghitung dampak jangka pendek dari nilai tukar terhadap neraca transaksi berjalan, pendekatan ini memiliki keterbatasan dalam menjelaskan hubungan jangka panjang dan keseimbangan dari neraca transaksi berjalan (Debelle and Faruqee, 1996).

Apabila ekspor lebih besar dari impor maka terjadi surplus neraca transaksi berjalan, yaitu apabila penerimaan dari perdagangan barang dan jasa serta transfer lebih besar dari pembayarannya. Apabila impor lebih besar dari ekspor yang terjadi adalah defisit neraca transaksi berjalan dan penerimaan dari perdagangan barang dan jasa serta transfer lebih kecil dari pembayarannya (Dornbusch dan Fisher, 2004).

2.2 Hubungan Antar Variabel

Pada Sub-bahasan ini akan membahas hubungan antar variabel, yang terdiri dari *tax buoyancy*, konsumsi, investasi, dan *trade openness*. Adapun hubungan antar variabel-variabel ini akan dijelaskan sebagai berikut.

2.2.1 Pengaruh Konsumsi Terhadap *Tax buoyancy*

Pengenaan pajak terhadap barang dan jasa tentu akan berdampak pada konsumsi masyarakat. Secara umum, Pajak dapat mempengaruhi tingkat konsumsi seseorang, semakin besar pajak yang dikenakan atas konsumsi misalnya pembelian barang-barang mewah yang dikenai pajak, maka akan semakin menurun tingkat seseorang untuk mengkonsumsi barang tersebut begitu juga sebaliknya, semakin kecil pajak yang dikenakan atas barang-barang konsumsi maka akan semakin meningkat konsumsi masyarakat tersebut. Penerimaan Pajak (PPN) dapat dibandingkan dengan daya beli masyarakat dikarenakan PPN merupakan pajak atas konsumsi barang dan jasa. Peningkatan atau penurunan daya beli masyarakat seharusnya dapat menggambarkan pertumbuhan penerimaan PPN. Jika daya beli masyarakat meningkat maka sewajarnya penerimaan PPN naik begitu juga sebaliknya, jika daya beli masyarakat menurun maka penerimaan PPN akan ikut menurun. Faktor harga komoditas tentu sangat mempengaruhi daya beli masyarakat. Menurut hukum permintaan dan penawaran dalam ilmu ekonomi, ketika harga suatu komoditas turun maka permintaan masyarakat akan komoditas tersebut akan meningkat. Begitu juga sebaliknya ketika harga komoditas naik maka akan mengurangi permintaan masyarakat akan komoditas tersebut.

Selain itu, Mona (2011) juga mengemukakan bahwa penerapan pajak penghasilan yang tinggi akan menurunkan tingkat konsumsi masyarakat. Pajak penghasilan dan pendapatan secara bersamaan akan mempengaruhi tingkat konsumsi masyarakat.

2.2.2 Pengaruh Investasi Terhadap *Tax buoyancy*

Pajak merupakan salah satu variabel penting dari investasi asing langsung. Menurut Shah (2013) sebagai investor asing langsung segala kegiatan baik positif atau negatif dipengaruhi oleh kebijakan pajak Negara. Perpajakan mengambil peran penting dalam ekonomi politik dan jika suatu negara menurunkan tarif pajak maka akan meningkatkan proses pertumbuhan dan perkembangan negara tersebut karena secara positif akan menarik para investor (Gedik, 2013).

Leitao (2010) menyatakan bahwa tingkat pajak berpengaruh negatif terhadap investasi asing langsung. Semakin tinggi tingkat pajak yang berlaku di suatu negara maka akan mengurangi jumlah investor yang akan berinvestasi di negara tersebut, karena tingkat pajak yang tinggi akan mengurangi jumlah keuntungan/laba dari perusahaan. Maka investor akan menanamkan modalnya pada negara yang menetapkan tarif pajak yang rendah.

2.2.3 Pengaruh *Trade Openness* terhadap *Tax buoyancy*

Kegiatan perdagangan internasional tak lepas dari kegiatan ekspor dan impor barang, sedangkan kegiatan ekspor dan impor barang ini tentu akan dikenai tarif oleh pemerintah. Tarif merupakan pajak ekspor atau impor yang dikenakan oleh suatu negara terhadap produk ekspor atau impor yang berasal dari negara lain yang dibawa ke dalam atau ke luar daerah pabean.

Kegiatan memasukkan (impor) atau mengeluarkan (ekspor) barang dari dan atau ke luar negeri yang dikenakan terhadap suatu jenis barang atau transaksi keuangan tertentu yang tidak bersifat individual (subjektif). Sehingga terjadi impor barang tertentu yang termasuk dalam kategori barang kena cukai dari luar negeri. Selain itu, impor juga dikenakan bea masuk dan juga dikenakan cukai. Sebaliknya, untuk produk dalam negeri yang dikenakan cukai apabila

diekspor atau dikirim ke luar negeri dapat dimintakan pengembalian cukainya.

Besarnya *trade openness* tentu akan berdampak pada penetapan tarif pajak yang selanjutnya akan berdampak pula pada nilai *tax buoyancy*. Dengan banyaknya aktivitas perdagangan yang tinggi maka pemerintah akan cenderung untuk meningkatkan tarif pajak untuk barang impor ataupun ekspor. Sehingga hal ini juga akan berdampak pada kenaikan nilai *tax buoyancy*.

Ningtyas (2017) mengemukakan bahwa ekspor secara parsial tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak. Namun sebaliknya, impor secara parsial berpengaruh terhadap penerimaan pajak. Temuan dalam penelitian ini adalah mengindikasikan setiap kenaikan nilai impor akan memberikan peluang meningkatnya penerimaan pajak.

2.3 Penelitian Terdahulu

Mona Dwi, Salfitri (2008) Pengaruh Pajak Penghasilan Terhadap Pengeluaran Konsumsi Masyarakat di Indonesia. Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda dan menggunakan uji-t dengan taraf signifikansi $\alpha=5\%$, uji model, serta uji determinasi, dengan menggunakan program SPSS. Hasil penelitian menunjukkan pajak penghasilan berhubungan negatif terhadap pengeluaran konsumsi masyarakat di Indonesia. Pajak penghasilan dan pendapatan secara serempak mempengaruhi pengeluaran konsumsi masyarakat sebesar 92,2 %. Hasil penelitian ini diharapkan bisa dijadikan acuan bagi pemerintah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan pengeluaran pajak di Indonesia.

Rini Sulistiawati (2012) yang meneliti tentang pengaruh Investasi terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Penyerapan Tenaga Kerja Serta Kesejahteraan Masyarakat di 33 Provinsi di Indonesia. Periode penelitian adalah lima tahun yaitu dari 2006 hingga 2010 dengan menggunakan data sekunder

yang disediakan oleh Biro Pusat Statistik dalam bentuk kombinasi antara data deret kali (dari 2006 hingga 2010) dan data cross-sectional (33 provinsi di Indonesia) yang juga dikenal sebagai data panel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: *Pertama*, investasi memiliki pengaruh negatif tetapi tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. *Kedua*, investasi memiliki efek positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja. *Ketiga*, pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja. *Keempat*, pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap kesejahteraan sosial. Kelima, penyerapan tenaga kerja berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap kesejahteraan sosial.

Zulkifli (2015) menganalisis tentang kontribusi investasi dan ekspor terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Selatan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda dengan menggunakan data periode tahun 2003 sampai 2015. Hasil penelitian ini menunjukkan Investasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Peningkatan Investasi Propinsi Sulawesi Selatan akan menyebabkan pertumbuhan ekonomi Propinsi Sulawesi Selatan. 2). Ekspor berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Peningkatan Ekspor Propinsi Sulawesi Selatan menyebabkan pertumbuhan ekonomi Propinsi Sulawesi Selatan meningkat.

Putu Kartika Dewi dan Nyoman Triaryati (2015) menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi, suku bunga dan pajak terhadap investasi asing langsung di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan ekonomi, suku bunga dan pajak secara parsial terhadap investasi asing langsung. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dari variabel investasi asing langsung, pertumbuhan ekonomi, suku bunga dan pajak, yaitu

merupakan data time series kurun waktu 13 tahun (2001-2013). Penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi linear berganda. Berdasarkan hasil analisis ditemukan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif signifikan terhadap investasi asing langsung dan suku bunga dan pajak berpengaruh negatif signifikan terhadap investasi asing langsung.

Nurhidayati (2013) meneliti tentang estimasi elastisitas dan *tax buoyancy* pertambahan nilai (PPN) di Indonesia. Konsep elastisitas digunakan untuk menentukan tingkat responsif otomatis (*built-in*) pendapatan pajak terhadap basis pajak. Sementara konsep daya apung berguna untuk mengetahui daya tanggap penerimaan pajak, baik terhadap basis pajak maupun untuk perubahan kebijakan. Dengan menggunakan indeks Divisia selama tahun 1984 hingga 2012, penelitian ini menetapkan bahwa koefisien daya apung dan elastisitas masing-masing adalah 0,99 dan 0,82. Ini menunjukkan bahwa PPN / PPnBM (PPN dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah) relatif apung, tetapi kurang elastis terhadap basis pajak. Meskipun menggunakan basis PDB sektoral dari 2005 hingga 2012, pendapatan PPN juga tidak elastis sehubungan dengan pengembangan basis pajak dengan koefisien 0,632 dan relatif tinggi terhadap PDB secara keseluruhan dengan koefisien 1,076. Sistem pajak tidak elastis memaksa pemerintah untuk terus melakukan perubahan kebijakan, baik dalam basis pajak atau dalam tarif pajak atau keduanya, agar dapat mengimbangi peningkatan pengeluaran publik. Selain itu, elastisitas titik menunjukkan bahwa sektor manufaktur dan pertambangan berfluktuasi karena sektor utama PPN dan sektor perdagangan relatif stabil dan ringan. Oleh karena itu, pemerintah perlu meninjau kembali kebijakan-kebijakan dari pangkalan dan struktur PPN, khususnya untuk sektor manufaktur dan pertambangan.

Dewi setyoningrum (2018) yang meneliti terkait dengan analisis *tax*

buoyancy pada ASEAN-5 (INDONESIA, FILIPINA, MALAYSIA, SINGAPURA, DAN THAILAND) tahun 2002-2016. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi analisis *tax buoyancy* di negara ASEAN-5 (Indonesia, Filipina, Malaysia, Singapura, dan Thailand) tahun 2002-2016. Metode analisis dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi data panel. Analisis regresi data panel dengan metode Common Effect Model digunakan untuk menganalisis pengaruh share sektor manufaktur, share sektor pertanian, share sektor impor, share sektor jasa, defisit anggaran, korupsi, dan reformasi perpajakan terhadap *tax buoyancy* di negara ASEAN-5 (Indonesia, Filipina, Malaysia, Singapura, dan Thailand) tahun 2002-2016. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Hasil regresi data panel menunjukkan bahwa share sektor manufaktur, share sektor impor, share sektor jasa, defisit anggaran, korupsi, dan reformasi perpajakan memiliki pengaruh dan signifikan terhadap *tax buoyancy*. Share sektor manufaktur dengan koefisien 1,30 sebagai faktor dominan yang mempengaruhi *tax buoyancy*. Sedangkan untuk share sektor pertanian memiliki koefisien -0,60 yang tidak berpengaruh secara signifikan terhadap *tax buoyancy* di negara ASEAN-5 (Indonesia, Filipina, Malaysia, Singapura, dan Thailand) tahun 2002-2016.

2.4 Kerangka Konseptual

Pada bagian ini akan diuraikan beberapa hal yang dijadikan peneliti sebagai landasan berpikir untuk kedepannya. Landasan yang dimaksud akan lebih mengarahkan peneliti untuk menemukan data dan informasi dalam penelitian ini guna memecahkan masalah yang telah dipaparkan sebelumnya.

Pajak merupakan merupakan variabel penting dari sektor-sektor ekonomi yang ada, serta salah satu sumber pendapatan negara. Perpajakan mengambil peran penting dalam pertumbuhan ekonomi. Selain itu, pajak ini tentunya di

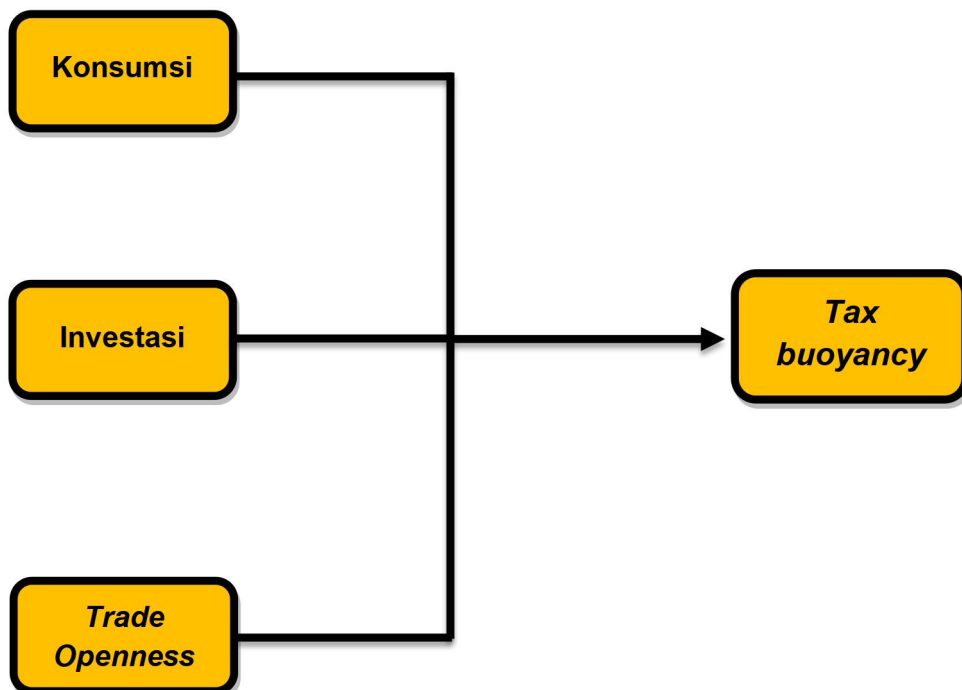
pengaruhi oleh beberapa variabel ekonomi. Konsumsi, investasi, dan *trade openness* merupakan beberapa variabel ekonomi yang turut mempengaruhi penerimaan pajak.

Konsumsi dan pajak merupakan dua variabel yang memiliki hubungan kausalitas. Peningkatan atau penurunan konsumsi masyarakat seharusnya dapat menggambarkan pertumbuhan penerimaan pajak. Jika konsumsi masyarakat meningkat maka sewajarnya penerimaan pajak naik begitu juga sebaliknya. Sholikhah (2020) yang meneliti tentang pengaruh konsumsi terhadap penerimaan pajak di Indonesia juga mengemukakan bahwa variabel konsumsi berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak, artinya naik dan turunnya konsumsi memiliki pengaruh terhadap jumlah penerimaan pajak. Hal ini disebabkan karena pajak yang ditetapkan pada barang dan jasa konsumsi merupakan salah satu sumber penerimaan pajak terbesar dan hampir sebagian besar barang dan jasa konsumsi yang ada di masyarakat sudah terkandung unsur PPN yang besarnya 10% dari harga jual.

Kemudian, variabel investasi juga memiliki pengaruh terhadap penerimaan pajak. Investasi umumnya berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan tingkat penerimaan pajak di suatu negara, sehingga akan ada permintaan agregat dan aktivitas ekonomi yang lebih besar di suatu negara yang dapat membantu pemerintah untuk menghasilkan lebih banyak pajak. MacDougall (1960) menemukan bahwa kesejahteraan ekonomi dapat ditingkatkan untuk negara melalui penerimaan pajak yang dihasilkan dari keuntungan investasi asing dan persediaan modal yang lebih besar. Kemp (1962) menyarankan bahwa negara-negara dapat memperkenalkan tarif pajak yang optimal pada investasi asing untuk meningkatkan kesejahteraan daripada menawarkan subsidi pada investasi asing.

Selain itu, Besarnya *trade openness* tentu akan berdampak pada penetapan tarif pajak yang selanjutnya akan berdampak pula pada nilai *tax buoyancy*. Dengan meningkatnya aktivitas perdagangan maka pemerintah akan cenderung untuk meningkatkan tarif pajak untuk barang dan jasa ekspor-impor. Sehingga hal ini juga akan berdampak pada kenaikan nilai PDB nasional dan diharapkan dari naiknya PDB nasional juga di ikuti dengan peningkatan penerimaan pajak, elastisitas penerimaan pajak terhadap pertumbuhan ekonomi/PDB disebut *tax buoyancy*. Hal ini senada dengan yang dikemukakan oleh Micah (2015) tentang liberalisasi perdagangan dan kinerja penerimaan pajak di Uganda menunjukkan bahwa keterbukaan perdagangan secara positif mempengaruhi kinerja penerimaan pajak.

Gambar 2.1
Kerangka Konseptual



2.5 Hipotesis

Berdasarkan rumusan masalah, landasan teoritis dan penelitian sebelumnya, maka hipotesis dalam penelitian ini yaitu:

- 1) Diduga konsumsi berpengaruh positif dan signifikan terhadap *tax buoyancy*
- 2) Diduga investasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap *tax buoyancy*
- 3) Diduga *trade openness* berpengaruh positif dan signifikan terhadap *tax buoyancy*